

MEDIA

Inti

Tak Gentar Bicara Benar

Jaya

• Edisi: 43 • Tahun II • 14 - 20 Agustus 2017

LSM Gibas Jaya Tolak Keras

Program Wanatani Nusantara

Karawang, MIJ

GELOMBANG aksi penolakan sebagian masyarakat terkait akan diadakannya program Wanatani Nusantara yang digagas oleh KH. Junaedi Al-Baghdadi terus berlanjut. Program Wanatani Nusantara sendiri bekerjasama dengan sepuluh instansi pemerintah, diantaranya Ke-

menterian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi, usaha kecil dan menengah, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kodam III/Siliwangi, dan Pemda Karawang.

PT. Al-Baghdadi Indonesia Sejahtera (ALBIS) perusahaan milik dari KH Junaedi Al-Baghdadi ini nantinya akan mengelola kawasan hutan Telukjambe I dan Telukjambe II, yang rencananya akan ditanami tanaman

Bersambung ke Hal 11

holtikultura yaitu jagung. Luas lahan kawasan hutan Telukjambe yang akan dialihfungsikan tersebut sekitar 5096 hektar.

Namun, rencana tersebut mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Gibas Jaya, melalui Sekjend nya H Toni Damanik mengungkapkan, ia menganggap program tersebut tidak berpihak kepada petani sekitar, justru akan menimbulkan konflik dengan petani yang berada dikarawang. Mengingat, konsep wanatani tersebut bukan konsep sosial. Harusnya wanatani ini menjadi program pemberdayaan, yang bisa memberdayakan masyarakat atau petani setempat, baik dari sisi modal, dari sisi teknis Keahlian, ataupun teknis pertanian itu sendiri.

"Kami menolak keras adanya Wanatani yang digagas oleh 10 instansi pemerintahan, karena akan memarjinalkan para petani Karawang," kata H Toni kepada *MJ*, Sabtu (5/8/2017).

Dikatakannya, salah besar jika membawa investor masuk ke dalam ranah pertanian, karena hal tersebut hanya akan menggeruk dan menjadikan petani lokal sebagai objek sapi perah. Langkah awal DPD Gibas Jaya dalam hal ini akan melakukan hearing ke Pemerintah Kabupaten Karawang dengan menolak adanya wanatani ini, dan walaupun tidak digubris, pasalnya akan terus ditembuskan ke pemerintah pusat.

Di tanah seluas 5 ribu hektar lebih yang akan dijadikan tempat wanatani tersebut tentunya sudah mempunyai penggarap, jika investor masuk dapat dipastikan ada konflik-konflik yang merugikan petani.

"Jangan semena-mena memasukkan investor luar tanpa adanya pendataan, tanpa sosialisasi, yang kemudian akan berdampak pada konflik masyarakat, karena masyarakat Karawang ini sudah bega (resah-red) dengan banyaknya konflik di tanahnya sendiri," katanya.

Ia berharap, konsepnya harus jelas dengan menggunakan konsep sosial. Juga harus bisa meningkatkan tarap hidup para petani dengan program pemberdayaan, dan nantinya para petani akan menjadi perencana sekaligus pelaksana, yang nantinya mereka sendiri yang akan mengevaluasi hasil kerja mereka sendiri.

"Jadi petani akan merasa dimanusiakan, jangan hanya sebagai objek saja, tapi menjadi subjek, jadi saya rasa program pemerintah ini tidaklah tepat kalau hanya menjadikan petani Karawang sebagai buroh," ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPD Gibas Jaya Karawang, Deny Darsono atau yang akrab dipanggil Deny Dollar, dirinya mengungkapkan bahwa program Wanatani Nusantara adalah bentuk akal-akalan pihak korporasi dengan mengatasnamakan petani untuk mengeruk keuntungan. Dan yang lebih dikhawatirkan, lanjut Deny Dollar. Dampak alih fungsi hutan, akan menimbulkan bencana buat Karawang.

"Ke depannya jangan kaget kalau di Karawang ada bencana banjir dan longsor, untuk itu DPD Gibas Jaya Karawang dengan tegas menolak program Wanatani Nusantara," pungkasnya. (Erwin/R. Bachtiar)



Pelantikan Pengurus DPD Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) Kabupaten Karawang Periode 2017 - 2021

Karawang, MIJ

BUPATI Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menghadiri sekaligus melantik kepengurusan PPSI Kabupaten Karawang yang bertempat di GOR Panatayuda, Karawang, (12/8). Acara yang bertemakan "PPSI Karawang Bakal Mibanda Jujur, Amanah, Panceg Dina

Galur, Nanjeurkeun Budaya Bangsa" ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PPSI Jawa Barat Kang Uu, Ketua KONI Kab. Karawang, Ketua DPD PPSI Karawang Kang Ajam, Paguyuban Pencak Silat Karawang, serta tamu undangan.

Bupati Karawang mengapresiasi atas terselengga-

ranya kegiatan ini dan mengharapkan PPSI Karawang dapat mencetak para pesilat Karawang yang tergabung dalam 43 paguyuban pencak silat Karawang dapat mengharumkan nama Kabupaten Karawang dikancah provinsi hingga nasional.

Beliau juga berpesan agar DPD PPSI Karawang dapat

amanah, jujur, dan profesional dalam berorganisasi sehingga para pendekar pencak silat Karawang dapat terbina dengan baik, berbudi pekerti baik, dan tetap cinta tanah air.

Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pencak Silat Indonesia (DPD-PPSI) Kabupaten Karawang melantik 28 orang pengurus PPSI dan yang

di ketuai oleh Drs. acep Jamhuri. Maksud dan tujuan acara ini diselenggarakan ialah mengembangkan pencak silat seni karuhun agar dapat berkembang dan diminati oleh seluruh kalangan, menjadikan PPSI sebagai wadah berkumpulnya para pendekar silat di Kabupaten Karawang. *(Her)*

Terkait Pengurugan Lahan Parkiran Kepala SMKN 1 Rengasdengklok

Terkesan Munafik



Karawang, MIJ

MASYARAKAT dari lingkungan sekitar mengangap SMKN 1 Rengasdengklok tertutup dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran sekolah. Pasalnya pihak sekolah selalu mengulur-ngulur waktu pelaksanaan audiensi yang diminta, untuk mempertanyakan pengelolaan dana yang masuk ke sekolah.

Menurut keterangan salah seorang tokoh masyarakat sekitar dan sebagai sekjen lembaga swadaya

masyarakat Gibas Jaya "H. Toni Damanik "Kami sudah menunggu selama 3 minggu agar bisa berkomunikasi terkait penggunaan anggaran yang masuk ke sekolah termasuk proses pembangunan lahan parkir, tetapi sampai saat ini mereka selalu mengulur waktu, kami perlu kejelasan. tegasnya kepada wartawan MIJ, Kamis (10/08/2017).

Mereka menganggap audiensi sangat penting dilakukan terhadap SMKN 1 Rengasdengklok, karena selama

ini menurut mereka anggaran yang masuk ke kas sekolah dinilai lebih dari cukup untuk operasional sekolah.

Tetapi pada kenyataannya pihak sekolah malah membebankan pungutan atau sumbangan kepada para wali murid. "Apa yang ditakutkan sampai pihak sekolah mengulur-ngulur waktu terus." imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selama penggunaannya benar sebagai wali murid tentunya dia mendukung setiap langkah yang dilakukan sekolah, termasuk pungutan jutaan rupiah. Tetapi hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan manajemen sekolah yang benar, salah satunya dengan melakukan transparansi terhadap wali murid. Jangan hanya mengedepankan pengumpulan dana, sementara penggunaannya masyarakat tidak tahu. "Rencananya kami audiensi laporan keuangan tahun 2016/2017 karena katanya pihak sekolah menunggak gaji honorer 3 bulan, dan akan

menanyakan juga rencana anggaran kegiatan sekolah tahun 2017 ini," terangnya.

Yang lebih penting lagi menurutnya pihaknya akan mempertanyakan keputusan sekolah yang rela berhutang kepada salah satu komite sekolah untuk pengadaan fasilitas parkir para siswanya. Tak tanggung-tanggung, dana talangan sebesar 400 juta rupiah digunakan untuk pembangunan parkir sekolah tersebut. "Khusus untuk parkir saya hanya ingin tahu alasan penggunaan dana talang ratusan juta tersebut sudah mendapat restu dari dinas apa belum, karena sepengetahuan kami para wali murid tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunannya," katanya lagi.

Menurutnya dalam pembangunannya sendiri dia mencurigai adanya rekayasa yang dilakukan pihak sekolah dengan komite. Pasalnya untuk sekedar pengurangan dan pengerasan yang dilakukan terhadap lahan parkir sekolah, dana sebesar 400

juta tersebut dinilai terlalu besar. Jelas hal tersebut menandai pertanyaan dari para wali murid termasuk dirinya.

"Bicara biaya pembangunannya sebesar 400 juta saja saya terkejut, padahal cuman dilakukan pengurangan dan pengerasan saja, apalagi tiap harinya mereka bisa mengumpulkan uang jutaan rupiah dari uang parkir siswa, ini jelas harus diungkap," keluhnya.

Sementara itu, Aba Wijaya, salah satu anggota komite SMKN 1 Rengasdengklok mengatakan, alasan pihak sekolah selalu mengulur waktu adalah karena kesibukan kepala sekolah. Sehingga komite dan sekolah belum merapatkan rencana audiensi yang akan dilakukan beberapa elemen masyarakat tersebut. "Saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, saat ini dia sedang sibuk banyak kegiatan, kepala sekolah memberikan waktu hari Sabtu minggu depan, selain itu saya tidak tahu," pungkasnya.

(Erwin)